



Kesiapan Koperasi Eksportir Kopi dalam Memenuhi Persyaratan Dokumentasi Regulasi Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR)

Arwen Angelica^{1*}, Akuat Supriyanto²

¹Bisnis Internasional, Universitas Padjadjaran, Indonesia

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Alamat: Jalan Ir. Soekarno KM. 21, Jatinangor – Sumedang 45363, Indonesia

Korespondensi penulis: arwenangelicaaa@gmail.com*

Abstract. *The European Union Deforestation Regulation (EUDR), officially adopted by the European Union in 2023, has gained various responses from exporters, mainly due to quite demanding perception on regulation. This study focuses on the smallholder group (cooperatives and farmers), as among most impacted parties considering the financial constraints, knowledge limitation, and technical capacity. The main emphasis focuses on the challenges to comply EUDR's documentation requirements, which include land use maps, sustainability certificates, land ownership documents, geolocation maps, proof of coffee land ownership, and the Supply Chain Traceability Report. This study aims to explore in depth the opportunities, barriers, and handling strategies adopted by exporting cooperatives. Primary data were collected through structured interviews with five cooperative representatives from various regions of Indonesia and analyzed using a thematic analysis method, referring to three main components of the Dynamic Capabilities Theory: Sensing, Seizing, and Reconfiguring. The outcome of this research presents internal and external strategic recommendations for cooperatives to prepare for the official implementation of the EUDR.*

Keywords: *Cooperatives; Documentation; Dynamic capabilities; EUDR; Smallholder*

Abstrak. Kebijakan *European Union Deforestation Regulation* (EUDR) oleh Uni Eropa yang secara resmi disetujui pada tahun 2023 menimbulkan berbagai tanggapan dari kalangan eksportir, khususnya karena substansi kebijakan tersebut dinilai cukup memberatkan. Penelitian ini disusun terfokus pada kelompok *smallholders* (koperasi dan petani), sebagai pihak terdampak EUDR, mengingat keterbatasan finansial, pengetahuan, dan kapasitas teknis. Fokus utama terletak pada tantangan dalam pemenuhan persyaratan dokumentasi EUDR, yang terdiri atas dokumen peta penggunaan lahan, sertifikat berkelanjutan, dokumen kepemilikan lahan, peta geolokasi, bukti kepemilikan lahan kopi, dan *Supply Chain Traceability Report*. Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam peluang, hambatan, hingga cara penanganan yang diberikan koperasi eksportir. Data dikumpulkan secara primer melalui wawancara terstruktur dengan 5 perwakilan koperasi dari beberapa wilayah di Indonesia, kemudian diolah melalui metode analisis tematik dengan mengacu pada tiga komponen utama teori kapabilitas dinamis (*Sensing, Seizing, Reconfiguring*). Hasil akhir yang akan disajikan penelitian berupa strategi dari sisi internal koperasi maupun eksternal untuk mempersiapkan pemberlakuan EUDR secara resmi.

Kata kunci: Dokumentasi; EUDR; Kapabilitas dinamis; Koperasi; *Smallholders*

1. LATAR BELAKANG

European Union Deforestation Regulation (EUDR) secara resmi diberlakukan oleh Uni Eropa pada 19 Mei 2023 sebagai kebijakan yang bertujuan mengurangi deforestasi global. EUDR menetapkan larangan masuknya komoditas seperti kakao, kopi, minyak kelapa sawit, karet alam, kayu, daging sapi, dan kedelai yang diproduksi di lahan hasil deforestasi setelah 31 Desember 2020 (Gilbert, 2024). Kebijakan ini juga mencakup produk turunannya, seperti coklat, kertas, dan permen berbasis kakao.

Sebelumnya, dunia telah mengenal REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*) yang diperkenalkan oleh UNFCCC pada 2008. REDD+ mendorong negara berkembang untuk mengurangi emisi karbon melalui pelestarian hutan dengan imbalan insentif finansial (Prasetyo & Trisnaningtyas, 2025). EUDR melanjutkan semangat ini, tetapi dengan cakupan dan ketegasan yang lebih spesifik dalam sektor komoditas ekspor.

EUDR menggantikan regulasi sebelumnya, *European Union Timber Regulation* (EUTR), yang mulai berlaku sejak 2013 dan hanya berfokus pada legalitas kayu (The European Parliament and The Council of the European Union, 2010). Berbeda dengan EUTR, EUDR mewajibkan data geolokasi, klasifikasi risiko (rendah, standar, tinggi), dan dokumen uji tuntas untuk memastikan komoditas bebas deforestasi (The European Parliament and The Council of the European Union, 2023).

Implementasi EUDR mensyaratkan produsen untuk melampirkan *Due Diligence Statement* yang dilengkapi dengan informasi detail seperti peta geolokasi lahan, izin usaha, dokumen legalitas penebangan, serta dokumen kepatuhan seperti sertifikat dari IFCC (*Indonesian Forestry Certification Cooperation*). Dokumen dari Kementerian Pertanian atau KLHK juga diperlukan untuk memastikan legalitas dan status lahan produksi.

Kebijakan ini hadir sebagai tanggapan terhadap tingginya angka deforestasi global, yang menyumbang emisi karbon sebesar lebih dari 4 miliar ton per tahun. Selama 2010–2020, deforestasi global tercatat mencapai rata-rata 4,7 juta hektar per tahun (Ritchie, 2021). Dengan EUDR, UE berharap mampu memangkas emisi hingga 55% pada 2030 sambil mempromosikan praktik bisnis berkelanjutan (Čekanavičius et al., 2014).

Indonesia sebagai eksportir utama kopi menghadapi tantangan signifikan akibat regulasi ini. Data dari BPS menunjukkan bahwa ekspor kopi Indonesia ke UE dalam periode 2018–2023 mencapai nilai signifikan, dengan Jerman, Italia, dan Belgia menjadi negara tujuan utama. Nilai ekspor tertinggi tercatat dari Italia sebesar US\$294,13 juta, diikuti oleh Jerman (US\$281,59 juta) dan Belgia (US\$236,04 juta).

Jika dibandingkan dengan negara tujuan ekspor non-Uni Eropa seperti Malaysia, India, dan Maroko, nilai ekspor kopi Indonesia ke negara-negara UE jauh lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa pasar UE sangat strategis dan berkontribusi besar terhadap ekonomi ekspor nasional, terutama dalam komoditas kopi (Data BPS, 2023).

Tren ekspor yang stabil ini kini menghadapi ancaman nyata dari regulasi EUDR, khususnya bagi koperasi petani dan eksportir skala kecil (*smallholders*). Ketidaksiapan mereka dalam memenuhi persyaratan administratif dan dokumentasi menjadi titik lemah utama.

Respon terhadap regulasi ini menunjukkan adanya keraguan dan keterbatasan kapasitas di lapangan.

Penelitian ini dirancang untuk menganalisis tingkat kesiapan koperasi petani-eksportir kopi di Indonesia dalam memenuhi dokumen dan prosedur yang ditetapkan EUDR. Fokus utama adalah pada aspek kesadaran terhadap isu lingkungan, hambatan administratif, serta kapasitas mitigasi yang dimiliki koperasi untuk tetap dapat mengekspor ke UE.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran menyeluruh mengenai strategi dan kesiapan koperasi petani-eksportir dalam menyikapi EUDR. Penelitian ini juga berkontribusi dalam penyusunan rekomendasi kebijakan dan pendampingan teknis yang dibutuhkan koperasi agar tidak kehilangan akses terhadap pasar UE yang sangat potensial dan menguntungkan bagi komoditas kopi Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Dalam menjawab sebuah rumusan masalah, karya ilmiah seperti skripsi memerlukan dasar teoretis untuk memberikan kerangka terkait aspek-aspek yang diteliti, sehingga fenomena dan masalah yang diteliti lebih mudah dipahami serta menawarkan fokus tertentu dalam upaya pemecahan masalah. Seperti dikutip oleh (Creswell, 2014), bahwa masalah penelitian adalah isu yang perlu diselesaikan, sehingga teori menjadi lensa untuk melihat dan memahami permasalahan tersebut. Adapun kosne-p-konsep atau aspek-aspek yang relevan untuk diuraikan dalam sub-bagian landasan teori ini adalah sebagai berikut:

Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional merupakan kegiatan lintas negara yang dilakukan dalam bentuk ekspor dan impor berdasarkan perbedaan kemampuan produksi masing-masing negara (Rinaldy et al., 2021; Vijayasri, 2013). Aktivitas ini tidak hanya berkaitan dengan kapabilitas suatu negara, tetapi juga melibatkan aspek legal dan finansial yang kompleks (Sulaiman, 2018). Uni Eropa (UE) memainkan peran penting dalam perdagangan global sebagai blok ekonomi dengan kontribusi 16% terhadap ekspor dan impor dunia serta memiliki lebih dari 130 perjanjian dagang internasional (European Parliament, 2024). Sebagai entitas supranasional, UE tidak hanya berfungsi sebagai organisasi ekonomi, tetapi juga sebagai aktor politik dan sosial yang menyatukan negara-negara Eropa dalam kerangka hukum dan tujuan kolektif (Alesina et al., 2005; Archer, 2008).

Krisis iklim global menjadi latar belakang munculnya kebijakan perdagangan internasional yang mengutamakan keberlanjutan. Peningkatan suhu global sebesar ± 0.74 °C

selama satu abad terakhir memicu perubahan iklim ekstrem (Mariana, 2023), yang berdampak pada berbagai sektor seperti kesehatan, pangan, dan ekonomi. Indonesia sebagai penghasil emisi gas rumah kaca terbesar keempat di dunia turut menjadi sorotan (Dunne, 2019). Organisasi seperti Uni Eropa merespons isu ini dengan menerapkan kebijakan perdagangan berkelanjutan, meskipun negara berkembang kerap menghadapi hambatan seperti biaya kepatuhan tinggi, regulasi ketat, dan ketidaksiapan infrastruktur (Henson & Mitullah, 2004; Aloui & Kenny, 2005; Basri & Riefky, 2023).

Selain *European Union Deforestation Regulation* (EUDR) yang secara tegas melarang masuknya komoditas dari lahan hasil deforestasi ke pasar Uni Eropa, terdapat pula kebijakan-kebijakan lain yang mencerminkan komitmen lingkungan UE, seperti *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM) dan *EU Food Law*, dimana kedua regulasi berkoordinasi beriringan untuk mencapai tujuan berkelanjutan global. Pembatasan dalam bentuk regulasi tersebut memiliki bentuk pendekatan yang berbeda, tetapi bagi sebagian pihak, penerapannya menjadi suatu polemik yang kerap diperdebatkan kompleksitasnya. Namun demikian, dibanding regulasi lainnya, EUDR memiliki dampak yang lebih luas. Latar terbesarnya adalah karena tidak hanya menasar keamanan produk, tetapi juga asal-usul dan keberlanjutan produksi komoditas secara menyeluruh, sehingga memunculkan urgensi kesiapan dokumentasi dari seluruh pelaku rantai pasok, termasuk koperasi petani di negara berkembang seperti Indonesia.

EUDR adalah kebijakan terbaru UE yang mulai berlaku pada akhir 2024 untuk membatasi masuknya komoditas hasil deforestasi, seperti kayu, kelapa sawit, dan kedelai (Fetting, 2020). Regulasi ini mewajibkan pernyataan *due diligence* sebagai bukti bahwa komoditas tersebut bebas dari deforestasi dan sesuai dengan hukum negara asal (Parliament, 2023). Kebijakan ini menjadi bagian dari *European Green Deal* yang menargetkan netralitas karbon pada 2050. Meskipun ditujukan untuk perlindungan lingkungan global, negara berkembang menghadapi tantangan besar dalam memenuhi syarat administratif dan risiko ditolakannya produk jika tidak memenuhi penilaian risiko.

Kebijakan Perdagangan Internasional Uni Eropa Terkait Keberlanjutan

Persoalan keberlanjutan menjadi sorotan utama dalam kebijakan internasional akibat perubahan iklim yang kian mengkhawatirkan. Peningkatan suhu global sebesar 0.74 ± 0.18 °C selama satu abad terakhir telah memicu iklim ekstrem sebagai akibat dari emisi karbon dan gas rumah kaca (Mariana, 2023). Indonesia, sebagai negara penghasil emisi gas rumah kaca terbesar keempat di dunia, turut menjadi perhatian global (Dunne, 2019). Dampak perubahan

iklim ini meluas ke berbagai sektor seperti pangan, ekonomi, dan kesehatan, mendorong organisasi seperti Uni Eropa untuk merespons melalui kebijakan perdagangan internasional yang berorientasi pada keberlanjutan (Varzakas & Smaoui, 2024).

Selain EUDR, Uni Eropa juga menerapkan kebijakan lingkungan lainnya seperti *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM) dan *EU Food Law*. CBAM mengenakan pajak karbon pada produk impor dari negara dengan regulasi lingkungan lebih longgar untuk mencegah kebocoran karbon, sementara *EU Food Law* mewajibkan sertifikasi seperti HACCP dan sistem *traceability* berbasis pendekatan “*Farm to Fork*”. Meskipun keduanya menimbulkan tantangan bagi negara berkembang, EUDR memiliki dampak yang lebih kompleks karena menuntut pembuktian asal-usul dan keberlanjutan komoditas secara menyeluruh, sehingga menjadi perhatian utama bagi koperasi eksportir di sektor pertanian seperti kopi.

Kebijakan lain yang dicanangkan UE adalah *European Union Deforestation Regulation* (EUDR), yang akan berlaku penuh pada 2025. Regulasi ini melarang masuknya produk dari tujuh komoditas utama seperti kelapa sawit, kayu, dan kedelai apabila terbukti berasal dari lahan deforestasi (Fetting, 2020). Untuk memenuhi regulasi ini, operator dan pedagang diwajibkan menyertakan *Due Diligence Statement* dan melakukan asesmen risiko berbasis geolokasi (Parliament, 2023). EUDR juga membagi negara asal komoditas ke dalam tiga kategori risiko (*low, standard, high*) yang menentukan ketentuan masuknya produk ke UE.

Sebagai langkah lanjutan, EUDR mewajibkan transparansi melalui publikasi tahunan *Due Diligence Statement* dan penggunaan sistem *traceability* untuk pelacakan rantai pasok (Pramana, 2019). Ketidakpatuhan terhadap regulasi ini akan dikenakan sanksi administratif seperti denda hingga 4% dari omzet tahunan, penyitaan produk, larangan ekspor, dan pembatasan akses dana publik. Kebijakan ini mencerminkan komitmen UE terhadap keberlanjutan lingkungan global, namun sekaligus menjadi tantangan besar bagi negara berkembang yang harus menyesuaikan diri dengan persyaratan regulasi yang sangat ketat

Koperasi Petani-Ekspor

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan individu atau badan hukum koperasi lain, dengan asas kekeluargaan dan prinsip koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992). Di Indonesia, koperasi terbagi dalam berbagai jenis seperti koperasi produsen, konsumen, pemasaran, simpan pinjam, serba usaha, dan koperasi petani (Alam, 2009). Koperasi petani secara khusus menangani aktivitas jual beli hasil pertanian dan penyediaan

sarana produksi seperti bibit dan pupuk. Struktur koperasi yang fleksibel dan berasal dari komunitas lokal memberikan keunggulan tersendiri dalam pengembangan bertahap menuju integrasi ke dalam sistem ekonomi nasional.

Meski kontribusi koperasi dan UMKM dalam ekspor baru mencapai 15,7% dari total ekspor nasional (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2025), potensi ekonomi koperasi tetap dinilai signifikan. Keterlibatan koperasi dalam aspek produksi hingga pemasaran membuatnya strategis dalam rantai pasok nasional (Nasution, Hidayati, Nasution, & Hasyim, 2024). Hal ini tercermin dalam berbagai inisiatif pembinaan ekspor oleh dinas koperasi, seperti di Jawa Barat (Putri & Azizah, 2023), serta penguatan koperasi pertanian untuk menembus pasar internasional seperti di Aceh Tengah (Hasan, 2014). Peran koperasi petani menjadi penting dalam mendukung ekspor produk pertanian dari sektor usaha kecil dan menengah.

Di balik keberhasilan tersebut, koperasi juga menghadapi tantangan serius dalam aktivitas ekspor. Beberapa kendala mencakup keterbatasan sumber daya manusia dan finansial, kurangnya akses terhadap teknologi digital, serta kesulitan dalam memenuhi dokumen ekspor (Sidabutar, 2014). Masalah kepercayaan publik juga timbul akibat kasus-kasus pelanggaran hukum, seperti gagal bayar dan penyalahgunaan dana anggota (Kontan.co.id, 2023). Tantangan-tantangan ini membuat koperasi rentan terhadap stagnasi dan tertinggal dibanding lembaga usaha besar, terutama jika tidak disertai dengan dukungan kebijakan dan peningkatan kapasitas yang memadai.

Penerapan regulasi EUDR oleh Uni Eropa menjadi tantangan eksternal yang signifikan bagi koperasi petani. Sebagai entitas yang tergolong dalam kategori operator kecil (*smallholders*), koperasi dan anggotanya terdampak langsung oleh persyaratan ketat seperti sistem pelacakan dan sertifikasi produk bebas deforestasi (Sahuri et al., 2024). Namun, keterbatasan modal dan infrastruktur menyebabkan banyak koperasi tidak siap memenuhi tuntutan tersebut. Jika tidak ditangani dengan serius, kondisi ini dapat menyebabkan hilangnya akses pasar ekspor ke Eropa, kerugian finansial, dan penurunan daya saing.

Untuk menghadapi tekanan dari kebijakan keberlanjutan global seperti EUDR, koperasi perlu menerapkan strategi adaptif yang sesuai dengan kapasitas mereka. Langkah-langkah praktis dan terjangkau seperti pelatihan dokumentasi, dukungan teknologi pelacakan sederhana, hingga pembentukan kemitraan dengan lembaga pendamping menjadi penting. Dukungan kebijakan nasional yang memfasilitasi transisi koperasi ke sistem ekspor berkelanjutan akan memperbesar peluang keberhasilan mereka dalam menghadapi tantangan

global, sekaligus memperkuat posisi koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat yang mampu berkontribusi dalam perdagangan internasional.

***Dynamic Capabilities* untuk Menghadapi EUDR**

Dynamic Capabilities merupakan konsep strategis yang merespons perubahan lingkungan bisnis yang fluktuatif, termasuk regulasi perdagangan internasional seperti EUDR. Menurut Teece, Pisano, dan Shuen (1997), kapabilitas dinamis adalah kemampuan perusahaan untuk beradaptasi terhadap perubahan melalui tiga proses utama, yaitu *sensing* (identifikasi ancaman dan peluang), *seizing* (pemanfaatan peluang), dan *reconfiguring* (penataan ulang sumber daya). Eisenhardt dan Martin (2000) menambahkan bahwa kapabilitas ini bersifat rutinitas strategis yang berkembang seiring perubahan dan ketidakpastian pasar. Dengan demikian, konsep ini menekankan pentingnya adaptasi berkelanjutan dalam menghadapi dinamika eksternal.

Ketiga komponen utama dalam kapabilitas dinamis memiliki fungsi spesifik. Komponen *sensing* memungkinkan perusahaan mengidentifikasi perubahan dan peluang melalui riset pasar dan analisis kompetitor. Komponen *seizing* membantu mengubah peluang menjadi nilai bisnis melalui tindakan konkret. Sementara itu, komponen *reconfiguring* memungkinkan restrukturisasi internal, termasuk teknologi dan proses operasional, untuk menjaga daya saing jangka panjang (Teece et al., 1997). Ketiganya membentuk satu kerangka adaptasi strategis yang mendukung keberlanjutan usaha dalam pasar yang penuh ketidakpastian seperti saat penerapan kebijakan EUDR.

Meski awalnya dikembangkan dalam konteks korporasi besar, teori kapabilitas dinamis terbukti relevan bagi koperasi dan UMKM (Situmorang, 2018). Aplikasi konsep ini tidak terikat pada skala usaha, melainkan tergantung pada kemampuan manajerial dan kewirausahaan kreatif. Penelitian Fitriati et al. (2020) menunjukkan bahwa penerapan *dynamic capabilities* berdampak positif terhadap pertumbuhan UMKM dalam menghadapi pasar yang berubah cepat. Selain itu, sejak 2021 banyak entitas usaha kecil telah menerapkan teori ini dalam praktiknya (Shiferaw & Kero, 2024), membuktikan bahwa keberlanjutan bukan monopoli perusahaan besar, melainkan dapat dijangkau oleh pelaku usaha kecil melalui strategi adaptif.

Studi Faiz Masnan dan Saad (2018) menemukan bahwa kapabilitas dinamis berpengaruh positif terhadap performa ekspor UMKM manufaktur di Malaysia, termasuk kemampuan menghadapi regulasi internasional yang ketat. Ketiga komponen *dynamic capabilities* terbukti membantu adaptasi terhadap ketidakpastian pasar, termasuk perubahan kebijakan seperti EUDR. Liliani dan Wiliana (2018) menegaskan bahwa komponen *sensing*

sangat krusial dalam mengenali tantangan regulasi, sedangkan seizing dan reconfiguring berkaitan erat dengan keputusan inovatif dan restrukturisasi strategis (Ambrosini, Bowman, & Collier, 2009). Oleh karena itu, kapabilitas dinamis menjadi strategi praktis yang relevan dalam konteks ekspor koperasi dan UMKM.

Dalam konteks koperasi sebagai bagian dari UMKM, penerapan kapabilitas dinamis dapat diformulasikan melalui tindakan konkret. Weaven et al. (2021) menyarankan tiga pendekatan: pertama, mengutamakan aksi performatif, yaitu membiasakan respons nyata dan adaptif terhadap perubahan; kedua, optimalisasi internal, yaitu pengembangan SDM dan infrastruktur melalui pembelajaran dan keterbukaan terhadap perubahan; dan ketiga, kolaborasi pengetahuan kolektif, yakni berbagi pengetahuan antaranggota dan kolaborasi eksternal untuk memperkuat adaptasi strategis koperasi. Dengan langkah-langkah tersebut, koperasi dapat memperkuat daya saingnya dalam lanskap perdagangan global yang semakin ketat dan kompleks.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena kesiapan koperasi petani-eksportir dalam menghadapi regulasi *European Union Deforestation Regulation* (EUDR). Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara rinci makna, pengalaman, serta strategi adaptasi pelaku koperasi dalam konteks yang alami dan aktual. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna sosial sebagaimana yang dialami individu secara langsung dalam kehidupan sehari-hari (Malterud, 2001). Selain itu, pendekatan ini menekankan pentingnya pemahaman terhadap latar sosial, ekonomi, dan kelembagaan koperasi dalam menyikapi kebijakan perdagangan internasional yang bersifat dinamis dan kompleks, seperti halnya EUDR (Somantri, 2005).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terstruktur melalui pendekatan *in-depth interview* terhadap lima responden dari koperasi eksportir kopi di wilayah Indonesia yang dipilih menggunakan teknik *snowball sampling*. Teknik ini dipilih karena efektif dalam menjangkau responden kunci yang memahami isu secara praktis, di mana responden awal merekomendasikan pihak lain yang relevan untuk diwawancarai (Prihastuty, 2023). Wawancara dirancang dengan protokol sistematis agar data yang dikumpulkan relevan dengan rumusan masalah penelitian, yang mencakup kesiapan dokumentasi ekspor, hambatan administratif, serta strategi mitigasi koperasi terhadap kebijakan EUDR. Proses wawancara

dilakukan secara bertahap pada periode Maret hingga April 2025, dengan mempertimbangkan ketersediaan waktu responden serta kondisi lapangan, baik secara daring maupun luring.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis tematik, yaitu metode yang bertujuan mengidentifikasi pola-pola atau tema dari data wawancara untuk menjelaskan pengalaman kolektif responden terhadap fenomena yang diteliti (Braun & Clarke, 2006; 2012). Proses analisis dilakukan melalui tiga tahapan utama menurut Miles dan Huberman dalam Saleh (2017), yakni reduksi data, yaitu proses penyaringan dan penyederhanaan data untuk fokus pada informasi relevan; penyajian data, dalam bentuk naratif atau matriks tematik; serta penarikan kesimpulan, yang dilakukan secara induktif dan terus diverifikasi selama proses berlangsung. Metode tematik dipilih karena fleksibel, aplikatif bagi peneliti pemula, dan mampu menjelaskan pemahaman kolektif komunitas koperasi terhadap tantangan ekspor berbasis keberlanjutan (Terry et al., 2017; Joffe, 2011). Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran utuh dan kontekstual terhadap kesiapan koperasi petani menghadapi dinamika regulasi perdagangan internasional.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum

Pengumpulan informasi mengenai EUDR telah dilaksanakan pada rentang bulan Maret hingga Mei. Fokus responden yang dicari adalah perwakilan dari koperasi ekspor kopi yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, seperti NTT, Garut, Bali, dan wilayah lainnya. Tujuannya adalah untuk mengetahui pandangan dan jangkauan kesiapan para eksportir dari tingkat koperasi terhadap isu EUDR yang tengah diisukan sejak tahun 2023. Mengacu pada protokol yang telah disusun sebelumnya, hanya satu responden yang diwawancara secara *offline* karena mempertimbangkan kenyamanan responden untuk berbagi dan kecocokan jadwal serta lokasi dengan peneliti. Berikut merupakan linimasa wawancara setiap responden:

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Wawancara Responden

No.	Nama Responden	Nama Koperasi	Tanggal	Waktu	Tempat Wawancara
1.	Damas Agas	Koperasi ASNIKOM	20 Maret 2025	09.00 - 09.16	Online
2.	Ilham Awaluddin	Koperasi Sari Buah Kopi	21 Maret 2025	16.00 - 17.50	
3.	Miftahudin Shaf	Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah	19 April 2025	15.00-15.20	
4.	Mochamad Aleh Setiapermana	Koperasi Produsen Kopi Margamulya	30 April 2025	15.20-16.05	On Site – Lobby Hotel

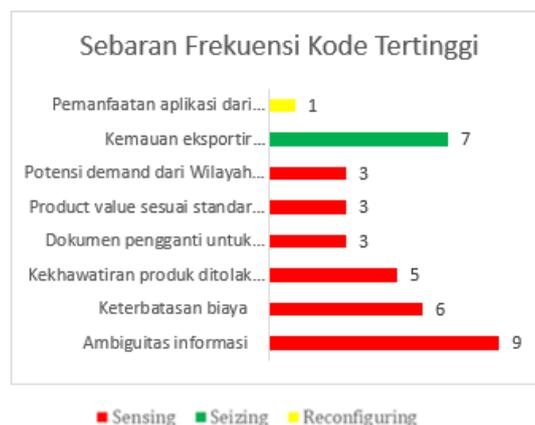
					Millenium Jakarta
5.	Made Arsana	Koperasi Kopi Wanagiri	2 Mei 2025	11.00-11.25	Online

Terdapat dua jenis hasil yang dijelaskan dalam penelitian, yaitu dari segi dokumentasi dan segi strategi yang mencakup hambatan dan cara penanganan. Data mengenai hambatan dan cara penanganan diketahui melalui penjelasan responden yang kemudian diolah melalui metode analisis tematik, yaitu berdasarkan penamaan *coding*. Peneliti pun berhasil mengumpulkan konfirmasi kondisi aktual eksportir terkait kelengkapan dokumentasi EUDR, dengan kondisi responden: 3 koperasi berpengalaman ekspor ke Eropa dan 2 koperasi belum pernah atau dan memiliki minat ekspor ke Eropa. Sehingga, adapun sedikit perbedaan dalam segi dokumentasi karena kondisi dasar koperasi yang berbeda.

Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan yang didasari pada penelitian ini, penulis mengolah hasil wawancara menggunakan *coding* dan grup berdasarkan komponen dari *Dynamic Capabilities*, yaitu *Sensing*, *Seizing*, dan *Reconfiguring*. Berdasarkan hasil wawancara dengan kelima responden, ditemukan total 25 kode, namun setelah dikaji ulang hanya kode dengan frekuensi tertinggi yang dimasukkan kedalam 3 grup komponen utama. Pun diketahui bahwa *coding* tertinggi dari masing-masing komponen *Seizing* (merah), *Reconfiguring* (kuning), dan *Sensing* (hijau). Namun, agar penyajian kode lebih terarah maka komponen *Sensing* akan dibagi dua, yaitu berdasarkan tantangan dan peluang. Data lebih lengkap dapat dilihat pada gambar berikut



Gambar 1. Mind Map Hasil Analisa Wawancara



Gambar 2. Diagram Sebaran Frekuensi per Kode

Perolehan intensitas dalam sebuah kode menggambarkan seberapa sering topik atau hal tersebut disinggung selama wawancara. Hal ini mengisyaratkan bagaimana kode-kode ini menggambarkan situasi yang saat ini terjadi di koperasi atas regulasi EUDR. Jika dilihat dari segi tantangan atau hambatan, terdapat beberapa *code* dengan intensitas tinggi (5-9). diantaranya adalah:

1. Ambiguitas informasi (9)
2. Keterbatasan biaya (6)
3. Kekhawatiran produk ditolak buyer karena ketidaklengkapan syarat EUDR (5)

Sementara dari segi peluang, intensitas tertinggi masih diperoleh di angka 3, yaitu:

1. Dokumen pengganti untuk syarat EUDR (3)
2. Eksportir menyadari *product value* sesuai standar internasional (3)
3. Potensi *demand* dari Wilayah Eropa (3)

Lain halnya untuk komponen *Seizing* dan *Reconfiguring*, peneliti menyusun kode lebih terinci karena jangkauan yang cukup luas dari respon eksportir, khususnya untuk komponen *Seizing*. Secara umum, ditemukan 6 kode dalam komponen *Seizing* dengan intensitas tertinggi pada kode “Kemauan eksportir untuk memenuhi syarat EUDR (7)”. Sedangkan, untuk komponen *Reconfiguring*, dibuat terfokus pada upaya yang ditunjukkan melalui kode “Pemanfaatan aplikasi dari pemerintah untuk geolokasi (1)”. Hal ini dikarenakan unsur komponen *Reconfiguring* yang bersifat *renewal* atau transformasi masif belum diaplikasikan oleh kebanyakan eksportir, kecuali penggunaan teknologi digital dalam mengatasi perubahan.

Jangkauan Kesiapan Dokumen

Mengikuti acuan regulasi EUDR pasal (9) dan (10), terdapat tujuh dokumen utama yang perlu dilengkapi oleh operator, produsen, hingga pedagang yang berkaitan pada kegiatan ekspor ke Eropa (Parliament, 2023). Termasuk *smallholders* dan koperasi yang tergolong pada kelompok operator, memiliki kewajiban untuk menyerahkan kelengkapan dokumen yang sama. Acuan ini menjadi latar bagi penulis untuk mengulik lebih dalam ke responden terkait, sehingga diwujudkan dalam bentuk wawancara terstruktur. Data kelengkapan dokumentasi masing-masing responden secara detail disajikan pada tabel berikut:

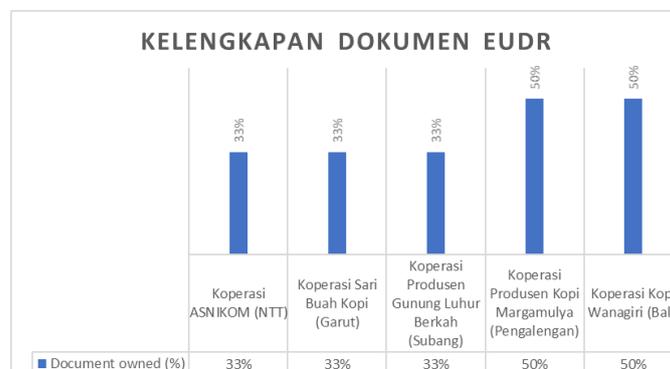
Tabel 2. Kelengkapan Dokumen per Koperasi

Nama Koperasi	Peta penggunaan lahan	Sertifikat berkelanjutan	Dokumen kepemilikan lahan	Peta geolokasi	Bukti kepemilikan lahan kopi	Supply Chain Traceability Report
Koperasi ASNIKOM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Koperasi Sari Buah Kopi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Koperasi Produsen Kopi Margamulya	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Koperasi Kopi Wanagiri	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> = Sudah memiliki dokumen <input type="checkbox"/> = Belum memiliki dokumen						

Secara keseluruhan, dapat diketahui dari data kelengkapan dokumen yang didapatkan dari masing-masing responden memperlihatkan belum ada eksportir yang sudah melengkapi seluruh dokumen terkait EUDR. Kebanyakan eksportir baru memiliki dokumen terkait kepemilikan usaha, kecuali Koperasi ASNIKOM yang belum secara hukum mengurus dokumen legalitas, namun secara adat tanah tersebut dimiliki oleh pihak koperasi. Dapat diketahui bahwa selain dokumen kepemilikan usaha yang bersifat wajib, 80% dari eksportir juga telah memiliki dokumen terkait kepemilikan lahan kopi. Namun, terkait dokumen yang berhubungan dengan EUDR, baru segelintir pihak yang sudah mulai menyiapkan, itupun belum merata dan secara solid dilakukan. Sementara beberapa pihak menunggu arahan lebih lanjut, serta memilih untuk mempersiapkan di nanti hari seiring berjalannya waktu.

Berdasarkan data yang didapatkan, penulis menyusun diagram yang menunjukkan tingkat kesiapan dokumentasi dari masing-masing koperasi dalam bentuk persentase. Persentase ini dihitung dari jumlah dokumen yang telah dimiliki dibandingkan dengan total dokumen yang disyaratkan, secara detail dapat dilihat pada gambar 4.3.

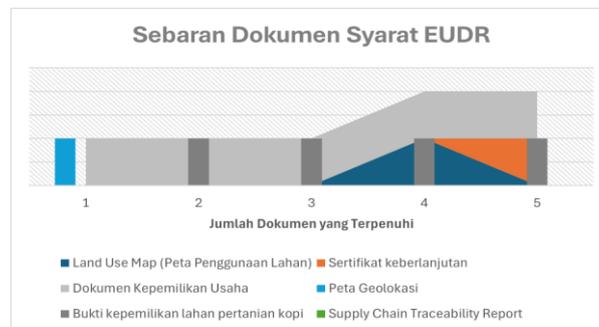


Gambar 3. Diagram Persentase Kelengkapan Dokumen EUDR

Setelah hasil pendataan dokumen sesuai yang dilampirkan di atas, diketahui bahwa baru 2 dari 5 eksportir yang setidaknya telah mencapai kelengkapan dokumen 50%. Selebihnya, koperasi lain baru melengkapi dokumen terkait badan usaha, kecuali bagi Koperasi ASNIKOM yang

telah memiliki data geolokasi. Secara dokumentasi, berdasarkan wawancara yang dilakukan, masing-masing koperasi cenderung memiliki kesamaan respon untuk lebih mengikuti dan menunggu arahan pemerintah terkait EUDR, baik melalui persiapan dokumen maupun persyaratan produk. Tendensi lain juga muncul, dimana eksportir cenderung memilih untuk tidak mempertaruhkan risiko dengan tetap menjadikan Eropa sebagai target ekspor, apabila syarat dokumentasi yang diberikan cukup menyulitkan dan sulit diakses. Hal ini yang mengakibatkan 3 koperasi lainnya memilih pengurusan dokumen di lain waktu.

Angka 50% pun belum dapat menandakan angka yang baik dalam kasus ini. Hal ini dikarenakan kebanyakan dokumen yang sudah dimiliki adalah dokumen dasar dalam usaha, bukan spesifik pada dokumen untuk EUDR yang sifat pengajuannya lebih rumit dan panjang. Sebaran dokumen yang belum dimiliki atau kurang oleh eksportir dapat dilihat pada gambar 4.4.



Gambar 4. Sebaran Minimum Dokumen Persyaratan EUDR

Dapat diketahui bahwa dari 6 dokumen yang dibutuhkan, sebagian besar koperasi baru melengkapi 2 dokumen, yaitu dokumen kepemilikan usaha dan kepemilikan lahan. Sementara, dokumen utama lain terkait EUDR memiliki sebaran yang sangat rendah. Dimana masing-masing terdapat Peta Geolokasi (1), Peta Penggunaan Lahan (1), Sertifikat Berkelanjutan (1), dan Supply Chain Traceability Report (0), sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar koperasi pun belum menindaklanjuti persyaratan tersebut yang terjadi karena beberapa faktor. Namun, tentu tetap ada potensi perkembangan di kemudian hari karena melihat dari peluang dan ambisi dari masing-masing koperasi.

Hambatan dalam Memenuhi Persyaratan EUDR

Menurut Smith & Lewis (2011), hambatan dalam bisnis seringkali muncul dari ketidakefisienan internal, keterbatasan sumber daya, dan ketidakpastian lingkungan eksternal. Akibatnya, diperlukan pengelolaan hambatan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dan mencapai tujuan organisasi. Melihat respon yang diberikan dari kelima

koperasi, dapat diketahui beragam alasan atau faktor yang menghalangi eksportir untuk memenuhi persyaratan dokumentasi EUDR. Namun, hasil pengolahan melalui metode analisis tematik berhasil memetakan tema dan kode pada komponen *Sensing Threats* untuk merepresentasikan hambatan dari respon yang diberikan. beberapa kode tertinggi atau faktor yang muncul dan menjadi penghambat utama pemenuhan syarat EUDR, diantaranya:

1. Ambiguitas informasi (9)
2. Keterbatasan biaya (6)
3. Kekhawatiran produk ditolak buyer karena ketidaklengkapan syarat EUDR (5)

Kode-kode dengan intensitas tertinggi tersebut mengacu pada kutipan-kutipan yang dibicarakan oleh responden selama wawancara. Dimana, setiap kutipan mengandung kata-kata berulang, khas, atau, sering disebutkan oleh responden. Lebih lengkapnya terdapat pada penjelasan berikut:

- **Ambiguitas informasi**

Minim dan ambiguitasnya informasi menjadi suatu tantangan yang paling sering disebutkan oleh para eksportir. 2 dari 5 eksportir menyebutkan hal ini cukup sering di dalam diskusi yang dilakukan dengan peneliti, menandakan hal ini menjadi hambatan yang paling kolektif dari kedua koperasi.

“Sejujurnya untuk dokumen dan lembaga yang mengeluarkannya itu saya belum tahu detailnya, malah baru tahu dari kakak ternyata sumbernya dari lembaga ini dan itu.” –

Responden 2

Meskipun hanya dirasakan sebagian eksportir, namun hal ini menggambarkan kekecewaan sebagian pihak, terutama dalam hal dukungan dari pihak eksternal dalam negeri terhadap kinerja ekspor di Indonesia. Bukti penguat lainnya dapat dilihat dari jawaban responden lain yang turut mendukung bahwa alur dan arahan yang kurang jelas, baik dari mitra pasar maupun pihak eksternal dalam negeri.

“Nah, kita belum punya sertifikat itu karena kita tidak tahu akses ke penerbitan itu tahapnya melalui siapa. Biasanya ada informasi dari negara mitra kita, mitra buyer kita. Dia menyampaikan kayak ke Mesir ini, anda harus daftar dulu di Cargo X dan kita sekarang sudah menjadi memberinya. Karena di Eropa ini ada memang permintaan, tapi tidak menuntun kita untuk proses ke sana itu harus seperti apa.” – **Responden 3**

Kondisi ini mengakibatkan sebagian pihak merasa bingung untuk menindaklanjuti regulasi EUDR. Di satu sisi, eksportir sudah memiliki niat dan kemauan untuk melengkapi syarat-syarat tersebut, namun keterbatasan informasi justru menjadi batasan mereka dalam bergerak. Dapat diketahui juga dari jawaban diatas bahwa alur ekspor yang

disediakan oleh negara lain cenderung lebih jelas dan terarah. Meskipun terdapat regulasi yang diterapkan, namun arahan dan komunikasi mitra yang lebih baik menjadi pertimbangan eksportir untuk mengalihkan target pasar ke negara-negara tersebut.

- Keterbatasan biaya

Hambatan atau tantangan tertinggi kedua adalah mengenai biaya. Total 3 dari 5 eksportir mengeluhkan hal yang sama terkait pembiayaan. Khususnya untuk biaya sertifikasi yang menjadi salah satu syarat EUDR. Untuk skala koperasi, biaya sertifikasi yang berkisar hingga ratusan juta bukanlah hal yang mudah untuk dibayarkan, mengingat batasan modal dan beban biaya lain-lainnya.

“Kalau kita sih selama itu masih bisa kita ikuti, kami sih sebenarnya tidak masalah. Karena memang kalau berbicara regulasi itu persyaratan-persyaratan ekspor itu kalau disikapin ada yang biayanya ga kecil ya. Belum lagi sertifikasi untuk EUDR lain sebagainya itu kayaknya kalau harganya tidak sebanding ya paling kita juga menghindar juga.” – **Responden 5**

Ketakutan para eksportir terutama adalah dalam hal pembiayaan. Dokumentasi ekspor tidak tergolong murah untuk sebagian pihak, sehingga hal ini menjadi penghalang utama, meskipun mereka telah bersedia untuk melengkapi syarat-syarat tersebut. Pada akhirnya, opsi yang kebanyakan dipilih oleh para eksportir adalah mengganti negara tujuan dengan pertimbangan biaya yang lebih minim maupun kuantitas yang diajukan tidak terlalu besar. Secara tidak langsung, keterhalangan para eksportir dalam pembiayaan turut berimbas pada upaya untuk melengkapi persyaratan dokumentasi.

“Tapi kalau misalnya buat ke pasar Eropa, yang jadi hambatannya pak Ale itu sebenarnya lebih ke stoknya yang gak ada. Bukan gak ada, belum diproses. Potensi lebih dari itu. Pasti permintaan mereka juga besar gitu kan ya.” – **Responden 1**

Lain cerita pada satu koperasi eksportir lainnya, permasalahan utama terkait pembiayaan yang dirasakan berkaitan pada stok gudang, sehingga mengakibatkan kuantitas pesanan yang diterima terbatas dan hanya dari negara tertentu. Tidak menutup kemungkinan hal ini turut berpengaruh pada kapabilitas eksportir pada pasar Eropa karena rata-rata permintaan yang masuk dari wilayah tersebut cukup besar dibandingkan negara lainnya, sedangkan jumlah kuantitas yang dapat disediakan oleh eksportir terbatas. Hal ini dikarenakan produk yang mampu diolah untuk disediakan sebagai *on-stock* juga disesuaikan dengan dana yang tersedia.

- Kekhawatiran produk ditolak oleh *buyer*

Menyadari ketidaksiapan eksportir dari segi dokumentasi yang merupakan syarat utama dari EUDR, hal itu tentu dapat terlihat dari respon yang ditunjukkan. Kebanyakan menyiratkan kegelisahan dan kekhawatiran atas produk yang mereka pasarkan kalau-kalau hingga periode ekspor tiba mereka masih belum siap melengkapi persyaratan. Namun, alih-alih menjadi antisipasi, sebagian eksportir cenderung menjadikan kekhawatiran sebagai alasan demotivasi. Maka dari itu, terdapat risiko besar atas kekhawatiran penolakan komoditi kopi untuk masuk ke Wilayah Eropa, terutama untuk pihak-pihak yang menjadikan Eropa sebagai pangsa pasar utama dan mulai kehilangan harapan untuk dapat terus melanjutkan aktivitas dagang ke pasar tersebut. *“Misalnya tidak dipenuhi syarat EUDR berarti kopi itu walaupun ekspor mungkin tidak diterima di sana karena dokumen-dokumennya kan tidak dipenuhi. Jadi ini menjadi kekhawatiran kami. Jadi untuk saat ini kami khawatir buyer tidak mau menerima produk kami.”* –

Responden 4

Meskipun dalam diskusi peneliti tidak menyebutkan hal terkait penolakan *buyer*, namun 3 dari 5 koperasi eksportir langsung menyinggung mengenai hal tersebut dalam jawaban yang diberikan. Hal ini menandakan ketidakpercayaan eksportir sendiri terhadap persyaratan yang diberikan dan menunjukkan keresahan apakah produk yang mereka pasarkan tetap dapat terus diekspor ke Wilayah Eropa.

Pendekatan Kapabilitas Dinamis untuk Mengatasi Hambatan Dokumentasi EUDR

Untuk mengetahui langkah yang diberikan koperasi dalam menghadapi hambatan yang diketahui dari komponen *Sensing Threat* menurut teori dinamik kapabilitas, diperlukan adanya pemahaman mengenai komponen lain yang saling berkaitan, yaitu *Sensing Opportunity*, *Seizing*, dan *Reconfiguring*. Dikarenakan ketiga komponen tersebut membentuk kerangka yang menggambarkan respon strategis koperasi terhadap tantangan EUDR. Dimana, peluang yang ditemukan pada kasus ini dapat menjadi landasan awal bagi koperasi untuk menyusun pendekatan yang efektif kedepannya. Komponen-komponen tersebut dijabarkan lebih mendalam pada sub-sub berikut dengan acuan kode tertinggi dari hasil analisa:

Sensing Opportunities

- **Dokumen pengganti untuk syarat EUDR**

Walaupun beragam hambatan dan tantangan disajikan di depan mata, namun masih ada celah dan peluang bagi para eksportir untuk dapat masuk ke pasar Eropa. Salah satunya adalah melalui dokumen-dokumen pengganti yang dimiliki para eksportir, total 2 dari 5

koperasi memiliki dokumen tersebut dan meyakini bahwa produk yang mereka pasarkan tidak akan bermasalah.

“Sekarang dokumen yang bisa kita sediakan itu dari sertifikat GI, sertifikat lainnya mungkin belum karena Pak Aleh juga kendalanya soal biaya. Lainnya paling mencantumkan dokumen kopi perhutanan sosial. Sudah bisa masuk ke Eropa, kalau dulu susah soalnya kepemilikan lahannya masih yang negara punya. Perhutani, kan itu perusahaan umum.” – Responden 1

Salah satu responden yang cukup optimis dengan pengalaman sertifikasi, serta dukungan dari pemerintah terhadap produk yang dipasarkan adalah Pak Aleh dari Koperasi Kopi Margamulya. Berdasarkan jawaban yang diberikan, beliau meyakini bahwa Sertifikat Indikasi Geografis (GI) merupakan salah satu sertifikat yang mampu untuk mewakili titik geolokasi yang disyaratkan dalam EUDR. Optimisme ini dapat menjadi salah satu peluang agar eksportir dapat bertindak lebih dalam melengkapi persyaratan.

- Eksportir menyadari *product value* sesuai standar internasional

Kesadaran *product value* dari seorang eksportir dapat menjadi sebuah poin plus di pasar. Nilai dari sebuah produk tidak dinilai hanya semata dari penampilan produk, namun juga kualitas dan lisensi yang diperoleh sehingga dapat ‘menjual’ di mata pembeli asing.

“Sebenarnya soal EUDR itu gak ada masalah ya harusnya karena dari Pak Aleh sendiri siap melengkapi dan optimis dengan produk yang sudah dipasarkan ini.” – Responden 1

Koperasi Margamulya menjadi satu-satunya responden yang memberikan jawaban cukup menjanjikan terkait regulasi EUDR. Jika dilihat, dokumen persyaratan yang dimiliki koperasi pun masih belum lengkap, namun pihak koperasi sudah meyakini siap apabila ada arahan untuk pembuatan dokumen tertentu. Selain kemauan, Pak Aleh sendiri juga optimis terhadap produk yang saat ini dipasarkan dan berlisensi Kopi Perhutanan Sosial. Poin ini yang menjadi suatu peluang bagi koperasi agar terus bergerak dan menyesuaikan dengan perubahan yang ada.

- Potensi *demand* dari Wilayah Eropa

Beberapa pihak menyadari, permintaan dari Eropa masih akan terus mengalir ke Indonesia karena popularitas kopi Indonesia secara global yang cukup besar. Meski demikian, bukan berarti para eksportir dapat menganggap sepele karena pemikiran bahwa permintaan akan terus datang di lain kesempatan. Alasannya selain karena tingkat permintaan yang tinggi, tentu menjadi keuntungan bagi eksportir yang berhasil memenuhi syarat dan masuk ke pasar Eropa, dimana tren ini memperkuat posisi kopi sebagai komoditas strategis dalam perdagangan internasional.

“Tapi untuk sekarang misalnya ke Eropa, kami belum ada dokumen penggantinya karena memang masih berupaya juga untuk cari kalau bisa konsultan yang bisa membantu karena sebetulnya saya berminat untuk melengkapi proses EUDR ini, karena tidak menutup kemungkinan ke depan kita punya market Eropa. Umpamanya jika ada fasilitas untuk EUDR, kita mau untuk mengikuti sampai kita dapat sertifikasi itu karena market komoditas kopi kan dinamis.” – Responden 3

Tidak dapat dipungkiri bahwa persiapan dokumentasi untuk EUDR akan cukup memakan waktu dan tenaga. Hal ini juga yang turut diantisipasi agar dapat disiapkan jauh hari sebelum permintaan tersebut diterima. Alih-alih, mengetahui Indonesia sebagai penghasil kopi terbesar dan andalan masyarakat global, seharusnya dapat menjadi pendukung agar para eksportir dapat segera melengkapi persyaratan, seperti yang dijelaskan Pak Miftah dari Koperasi Gunung Luhur Berkah.

Seizing (Memanfaatkan Peluang)

Setelah masing-masing kode dari peluang dan hambatan diketahui, komponen *Seizing* atau pemanfaatan peluang dapat digali lebih dalam. Terdapat beragam cara dari masing-masing eksportir untuk menggambarkan bagaimana cara mereka mengekspresikan upayanya dalam menyikapi peluang dan hambatan yang muncul. Namun, seluruh aksi dan upaya yang mereka berikan hanya dituang dalam kode “Kemauan eksportir melengkapi syarat EUDR” (7) karena respon yang beragam tergantung pada situasi koperasi. Sebanyak 4 dari 5 eksportir memberikan respon yang dapat digolongkan pada kode ini, diantaranya:

“Nah itu yang sampai hari ini kami masih benahi. Pertama tahapan evaluasi, kemudian tentang beberapa persyaratan seperti kepemilikan lahan semua sudah jelas, tapi untuk traceability, geolokasi dan lahan-lahan yang diperlukan dari mana kopi itu berasal, itu masih kami siapkan.” – Responden 4

“Kami sedang berupaya melalui aplikasi dari pemerintah untuk menggambarkan lokasi di mana kopi itu berasal, supaya nanti tidak terkait dengan hutan. Tapi aplikasinya belum rampung, sudah kami follow up bulan Februari kemarin. Dari aplikatornya masih mengatur karena kami masukkan berapa informasi terkait dengan hal-hal apa yang perlu dibenahi aplikasi itu. Jadi mereka masih tahap maintenance-nya.” – Responden 4

Dapat diketahui bahwa proses pemenuhan syarat EUDR masih berjalan dan upaya yang dilakukan bukan hanya secara internal, namun juga eksternal. Pihak koperasi turut aktif melakukan tindak lanjut atas bantuan yang diberikan pemerintah hingga mencari informasi terkait ke pihak yang berkaitan. Hal itu tidak luput dari langkah-langkah yang sudah diambil

pemerintah dalam membantu memenuhi persyaratan EUDR. Meskipun, respon bantuan dari pihak eksternal dirasa belum cukup optimal, namun pihak koperasi terlihat telah berusaha semaksimal mungkin agar dapat memenuhi persyaratan EUDR secepatnya.

“... untuk data traceability sebetulnya kemarin kan di Dinas Pertanian juga sudah melakukan kegiatan traceability-nya itu. Apa ya namanya? Kayak tagging gitu lah. Kegiatan-kegiatan itu tujuannya untuk mengetahui potensi kopi yang secara real yang ada di desa. Itu juga untuk dimasukkan sebagai database. Tapi, masih belum maksimal dan datanya sampai sekarang belum kami terima.”- Responden 5

“Harapan dan niatan sih ada. Makanya saya lagi genjot di on-farm-nya supaya kan kita harus nyiapin juga nih produktifitasnya gitu. Lahan-lahannya kita juga siapin. Sekarang kita lagi melakukan penanaman-penanaman terus. Pembaruan-pembaruan tanaman kopi gitu. Semoga lagi beberapa tahun ke depan ini kita bisa kejar untuk ekspor gitu. Kalau kita sih selama itu masih bisa kita ikuti, kami sih sebenarnya tidak masalah.” – Responden 5

Di lain sisi, ada pula eksportir lain yang memiliki upaya berbeda dalam mengusahakan pemenuhan syarat EUDR. Khususnya bagi koperasi eksportir yang belum berpengalaman masuk ke Wilayah Eropa, alasannya karena kuantitas permintaan dari Wilayah Eropa kebanyakan berjumlah cukup besar. Akibatnya yang perlu difokuskan saat ini adalah jumlah stok ketersediaan di gudang dahulu yakni melalui tingkat produktifitas, sementara untuk sertifikasi keberlanjutan nyatanya sudah dimiliki oleh koperasi tersebut. Selain itu, dokumen terkait EUDR juga sudah mulai dipersiapkan perlahan, khususnya untuk data *traceability* dengan bantuan dari pemerintah. Sama halnya dengan kasus sebelumnya, respon dan tindakan dari pemerintah terkait bantuan EUDR memang masih belum responsif, namun perlahan sudah ada upaya yang diberikan kepada para eksportir.

“Jadi kita sudah berkonsultasi dalam hal ini dengan pihak pemerintah juga, kami ajukan stakeholder untuk memfasilitasi kami untuk mendapatkan sertifikasi EUDR itu. Ya sebagai umpama ini contoh komunikasi dengan ini, ini gitu kan. Tapi tanggapannya dari pihak yang direferensikan pemerintah ini masih sebelum respon atau bagaimana gitu.” –

Responden 3

Dapat disimpulkan bahwa koperasi juga sudah memberikan aksi dan usahanya dalam melengkapi persyaratan EUDR. Tidak jauh berbeda dengan koperasi sebelumnya, permasalahan yang ada juga mengenai *stakeholders* atau pihak eksternal, baik melalui informasi yang beredar atau fasilitas yang diberikan dirasa masih kurang optimal.

“Kalau-kalau diminta *Certificate of Origin* atau dokumen lain untuk ekspor Pak Aleh siap membantu. Pak Aleh yang datang menghadap ke kepala dinas Provinsi Jawa Barat.” –

Responden 1

“... misal untuk pemenuhan *Rain Forest*, harus ada kebun kopinya, harus ada pengolahnya, titik-titik itu pake GPS. Nah Pak Aleh siap membantu, nanti ketika dibutuhkan, kita bergerak ke lapangan.”- **Responden 1**

Kasus serupa juga ditemukan di koperasi lain, dimana pihak koperasi sudah menyatakan ketersediaannya dalam memenuhi data terkait syarat EUDR. Hal ini mencakup data-data terkait geolokasi hingga *traceability* komoditi, bahkan pihak koperasi juga sudah menyediakan *barcode* khusus yang menyajikan data pelacakan produk. Upaya ini menandakan adanya perencanaan dan antisipasi dari pihak koperasi dalam menyikapi regulasi EUDR agar dapat memudahkan perolehan data.

Reconfiguring (Pengaturan Ulang)

Komponen *Reconfiguring* (pengaturan ulang) merupakan tahapan yang seharusnya memuat strategi rekonstruksi atau penyusunan ulang tatanan dalam sebuah organisasi, baik melalui teknologi maupun sistem operasional. Dalam kasus isu EUDR, pemberitaan mengenai regulasi baru marak diperbincangkan di tahun 2023 dan hingga saat ini pun beberapa koperasi nyatanya belum menetapkan strategi konkret terkait transformasi atas regulasi tersebut, bahkan beberapa koperasi juga ada yang belum menindaklanjuti regulasi tersebut dikarenakan belum adanya penetapan regulasi secara resmi. Maka dari itu, belum ditemukan komponen *Reconfiguring* yang signifikan dari masing-masing koperasi, kecuali penggunaan teknologi digital yang mulai dimanfaatkan untuk membantu proses pemenuhan syarat EUDR, khususnya geolokasi dan *traceability*.

“Kayak *tagging* gitu lah. Kegiatan-kegiatan itu tujuannya untuk mengetahui potensi kopi yang secara real yang ada di desa. Itu juga untuk dimasukkan sebagai database Tapi, masih belum maksimal dan datanya sampai sekarang belum kami terima.” – **Responden 5**

Diketahui hingga saat ini baik dari koperasi maupun pemerintah sudah mulai perlahan mengupayakan data yang dapat mendukung kelengkapan dokumentasi EUDR. Termasuk dalam upaya pemanfaatan aplikasi dan *software* tertentu untuk mempermudah akses karena kondisi lapangan yang agak menyulitkan untuk dilakukan survey *on-site*. Hal yang sama pun dirasakan oleh Pak Damas, dimana koperasi yang saat ini dikelola juga sudah menerima bantuan pemerintah terkait pengumpulan data titik koordinat lokasi, namun sayangnya hal yang

sama juga turut dikeluhkan yakni mengenai layanan aplikasi yang belum maksimal dan masih dalam tahap pemeliharaan.

Pembahasan

Sedari awal regulasi EUDR pertama kali mencuat ke publik, beragam respon telah berhasil dituai. Sebagian pihak menganggap misi keberlanjutan yang dibawa Uni Eropa merupakan apresiasi yang baik terhadap kondisi lingkungan global. Namun, sebagian pihak juga turut menentang regulasi tersebut dengan dalih perencanaannya yang kurang melibatkan negara lain dan malah memberatkan, khususnya pada kondisi sosial-ekonomi negara berkembang (Sipayung, 2023). Hal ini turut dikuatkan dalam pernyataan yang dimuat sebuah artikel dari Mongabay, mengenai regulasi EUDR yang merupakan sebuah ancaman bagi sebagian besar petani karena keterbatasan sumber daya, serta dukungan eksternal (Mongabay, 2023). Akibatnya, para *smallholders* bukan hanya berpotensi kehilangan pasar, namun juga tersisih dari rantai pasok global karena kurangnya kapabilitas untuk memenuhi persyaratan tersebut (Hasan, Ahmad, Hidayat, Zubaidah, & Al Ghifari Azizi, 2023)

Tentu isu tersebut menjadi suatu tantangan tersendiri, namun jika membicarakan bagaimana cara menangani suatu hambatan tentu akan timbul berbagai ide dan pemikiran yang berbeda dari setiap kepala. Terlebih jika dihubungkan pada Teori Kapabilitas Dinamis, akan ada beragam kemampuan yang ikut tergolong masuk sesuai dengan urgensinya untuk mencapai lingkungan bisnis yang dinamis. Hal ini juga dibahas tentang bagaimana Kapasitas Dinamis melibatkan kemampuan inovasi internal yang dapat secara langsung memengaruhi performa UMKM dalam melakukan ekspor, maupun kemampuan organisasional seperti pemasaran, teknologi, hingga *market-sensing* (Bagus P, Afifah, & Mustaruddin, 2024). Optimalisasi kemampuan-kemampuan tersebut juga tentunya dapat meningkatkan nilai kompetitif pada pasar internasional.

Alasannya adalah kedinamisan sendiri berkaitan sangat erat dengan inovasi, dimana solusi adaptif berpotensi menjadi bahan untuk berinovasi dan wujudnya pun beragam tidak terpaku pada satu-dua kemampuan saja. Pun disebutkan oleh Teece tentang bagaimana Kapabilitas Dinamis berkuat sehari-harinya dengan *creative managerial* dan *entrepreneurial acts*, yaitu tindakan yang menggambarkan pengelolaan suatu bisnis dengan pendekatan yang proaktif, struktural, dan inovatif, sehingga tindakan yang dilakukan masing-masing instansi akan sangat bervariasi dan adaptif dengan tujuan memanfaatkan peluang, serta mengatasi hambatan yang dihadapi (Khourh, Windhyastiti, & Ratnaningsih, 2021).

Dengan demikian, Teori Kapasitas Dinamis dalam penelitian ini akan menjadi acuan dalam menjawab hambatan serta upaya pihak terkait dalam menyikapi permasalahan yang ada. Pada faktanya, unsur *Sensing*, *Seizing*, dan *Reconfiguring* dapat merepresentasikan hambatan dan upaya penanganan yang dilakukan suatu kelompok atau individu terhadap suatu peristiwa. Salah satu penelitian terdahulu yang mengadopsi teori tersebut juga menyebutkan bahwa penggunaan *Dynamic Capabilities* dapat dimanfaatkan untuk menganalisa hambatan dan peluang, serta pengembangan strategi adaptasi yang efektif (Puteri & H. M, 2014). Dimana peneliti menggunakan ketiga komponen, yakni *Sensing*, *Seizing*, dan *Reconfiguring* untuk menyusun strategi keunggulan kompetitif berkelanjutan. Hal inilah yang akan diaplikasikan peneliti untuk dapat menggali strategi yang tepat terhadap isu EUDR di Indonesia.

a. Strategi Koperasi Menghadapi EUDR

Berdasarkan analisa dengan acuan teori Teece mengenai *Dynamic Capabilities*, ditemukan beberapa hambatan dan peluang koperasi dalam menghadapi EUDR yang telah dibahas lebih dalam pada bab sebelumnya. Atas hambatan dan peluang tersebut, pun penulis menyusun strategi bagi pihak terkait untuk menghadapi regulasi EUDR, yaitu:

1) Strategi Internal

Merupakan proses identifikasi sumber daya, kelebihan, dan kelemahan organisasi yang menjadi acuan untuk merumuskan perencanaan perusahaan dalam mencapai tujuan jangka panjang (Shiferaw & Kero, *Dynamic capabilities view practices of business firms: a systematic literature review*, 2024). Strategi ini tidak hanya bersifat mengatur untuk periode waktu tertentu, namun juga dalam jangka panjang, termasuk dalam situasi yang tidak konsisten. Akibatnya tidak jarang perusahaan melakukan restrukturisasi atau alih strategi dalam menghadapi perubahan eksternal yang tidak terkontrol (Domínguez-Cc & Barroso-Castro, 2017). Atas dasar tersebut dan menyikapi perubahan regulasi perdagangan yang kerap terjadi secara tiba-tiba, seperti EUDR, secara internal perusahaan perlu mengupayakan strategi baru yang dapat mendukung keberlanjutan. Beberapa upaya dapat dilakukan, diantaranya:

- **Familiarisasi Ekspor pada Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi**

Secara internal, demi menunjang aktivitas ekspor, akan lebih baik untuk melakukan pengelolaan sumber daya manusia. Tujuan utamanya adalah untuk membuka wawasan koperasi dan meningkatkan kesadaran SDM terkait ekspor, termasuk hal mengenai isu yang berkaitan, sehingga

permasalahan mengenai keterbatasan sumber informasi dapat diminimalisir. Hal ini akan membantu koperasi untuk memperoleh informasi lebih mendalam dengan dukungan internal, yaitu SDM yang berproses di dalam koperasi. Implikasinya dapat dilakukan dengan mengikuti pelatihan, *workshop*, pembekalan, sosialisasi, maupun agenda non-formal, seperti *gathering* dengan sesama eksportir. Dengan demikian, koperasi dapat memfamiliarisasi paparan mengenai ekspor agar secara tidak langsung mampu meningkatkan wawasan terkait hal tersebut dan lebih mawas dalam menyusun strategi atau perencanaan kedepannya.

- **Melengkapi Dokumen Secara Progresif**

Pada beberapa kasus masih ditemukan koperasi memilih untuk menunggu informasi atau konfirmasi lebih lanjut mengenai EUDR. Keluhan utama adalah terkait pembiayaan karena probabilitas regulasi diberlakukan masih sekitar 50%. Sebagian besar koperasi enggan mengambil langkah antisipasi lebih jauh, terlebih biaya pengurusan dokumentasi EUDR yang cukup besar membuat koperasi ragu mengeluarkan dana untuk peraturan dengan status yang belum pasti. Tidak ada yang salah dalam pemikiran ini, namun koperasi tetap dapat secara paralel mengarah ke persiapan dokumentasi atau setidaknya berusaha untuk mencari informasi terkait persyaratan yang diberikan untuk menunjukkan upaya koperasi secara tindakan dalam menyikapi regulasi ini.

Dikarenakan melihat peluang koperasi yang memiliki tingkat permintaan dari Wilayah Eropa cukup tinggi, menjadikan regulasi ini sebagai peluang. Bukan hanya sebagai penanda bahwa koperasi berhasil lolos EUDR, namun juga memperkuat posisi kopi Indonesia di mata pasar global. Sehingga, tantangan dalam memenuhi dokumentasi EUDR sepatutnya dapat menjadi peluang bagi koperasi untuk berkembang. Secara sederhana, hal ini juga dapat secara positif berdampak, apabila di kemudian hari EUDR secara resmi ditetapkan koperasi tidak perlu terburu-buru dalam mencari informasi karena telah mempersiapkan diri sejak jauh hari.

- **Audit Rantai Pasok**

Upaya ini merupakan salah satu cara untuk mengantisipasi kasus terburuk jika lahan yang selama ini digunakan berkaitan dengan deforestasi. Pemeriksaan secara menyeluruh diperlukan untuk mengetahui secara jelas

asal muasal produk, sehingga apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan adanya ketidakselarasan dalam *traceability*, akan langsung diketahui dan diatasi lebih lanjut. Tentu hal ini akan berdampak positif terhadap eksportir, dimana kemungkinan komoditi berasal dari area deforestasi dapat dicegah lebih awal. Probabilitas eksportir tidak lolos uji tuntas (*Due Diligence Statement*) juga turut dapat diminimalisir, sehingga cukup membantu proses pengumpulan laporan *traceability*.

- **Aktif dan Proaktif terhadap Pihak Eksternal**

Berdasarkan jawaban dan respon dari pihak koperasi, sebagian besar mengarah pada tantangan-tantangan yang berhubungan dengan pihak eksternal, seperti pemerintah, konsultan, atau pihak ketiga lainnya. Faktanya, sebagai pelaku usaha, sangat wajar dan bahkan direkomendasikan untuk terlibat aktif dengan pihak eksternal tersebut karena operasional usaha tidak mungkin berjalan sendiri. Kontribusi dari pihak luar pun akan sangat berdampak, termasuk dalam menyikapi permasalahan persyaratan. Tujuannya agar pelaku usaha tidak hanya menghadapi perubahan secara pasif, namun menghadapinya sebagai tantangan untuk berkembang.

Beberapa tindakan dapat dilakukan, seperti menggali lebih banyak informasi terkait regulasi dengan pemangku kepentingan, mencari tahu bantuan pendanaan oleh perbankan setempat maupun pemerintah, maupun tindakan lainnya yang dapat mendukung proses melengkapi persyaratan regulasi. Secara tidak langsung, hal ini menjadi bentuk strategi mitigasi karena begitu koperasi dapat mengakses informasi-informasi tersebut, peluang lainnya pun akan terbuka. Sebagai contoh, hasil dari koordinasi yang baik dengan pihak eksternal dapat membuka peluang untuk adanya kolaborasi atau hubungan mutual antar usaha atau badan yang dapat mempermudah pemenuhan syarat. Sehingga, dukungan ini dapat membimbing koperasi pada kelengkapan EUDR dengan tujuan akhir memperkuat daya saing koperasi dalam menembus pasar ekspor yang menuntut syarat berkelanjutan.

b. Strategi Eksternal

Jika membicarakan mengenai strategi, hal ini tidak akan luput dari pihak eksternal, dimana tantangan yang dihadapi akan turut bersumber dari lingkungan eksternal dan

koperasi menjadi pihak yang perlu menempatkan diri secara kompetitif agar dapat bertahan dengan perubahan yang ada (SAGE Publications Ltd, n.d). Dalam kasus ini, pihak eksternal yang cenderung berkaitan pada cara koperasi menghadapi EUDR adalah pemerintah. Hal ini dikarenakan pemerintah sendiri berperan untuk mendukung UMKM, termasuk koperasi, dalam hal finansial, pemasaran, Sumber Daya Manusia (SDM), hingga pengaturan dan pengendalian (Sjafudin, 1995). Maka dari itu, dukungan dari pihak pemerintah memainkan peran yang amat signifikan untuk mendukung pertumbuhan UMKM. Dalam kasus pemenuhan syarat EUDR, berikut merupakan beberapa upaya yang dapat dilakukan:

- **Pemerataan Sosialisasi Terkait EUDR**

Isu EUDR memang merupakan isu yang sempat panas di tahun 2023, khususnya di kalangan para eksportir. Meskipun, saat ini status regulasi masih ditunda karena berbagai polemik dari berbagai pihak, faktanya di lapangan sebagian kelompok masih ada yang belum teredukasi atau terinformasi mengenai hal ini. Sehingga, bisa disimpulkan isu ini mungkin hanya naik di beberapa kalangan atau kelompok saja, sedangkan badan usaha yang kurang terakses informasi tersebut karena jarak atau batasan fasilitas kurang mendapat paparan. Celah inilah yang diharapkan dari pemerintah untuk dapat menyebarluaskan jangkauan informasi dikarenakan adanya kemungkinan regulasi secara resmi diberlakukan di kemudian hari.

Melihat dari respon yang diberikan, dapat disimpulkan hanya 2 dari 5 koperasi sudah menerima bantuan dari pemerintah berupa sosialisasi informasi dan aplikasi penunjang untuk pengumpulan data. Selain tanggapan yang kurang mengenakan terkait bantuan penunjang, sebagian besar dari responden juga menguatkan bahwa informasi yang lebih detail mengenai regulasi baru bisa diketahui melalui pertukaran informasi dengan relasi. Penyebab utamanya adalah karena tahapan sosialisasi yang kurang menyeluruh dan maksimal, bahkan belum semua wilayah menerima sosialisasi resmi dari pemerintah. Beberapa dari mereka juga menunjukkan kekecewaan dan kekhawatiran karena informasi yang disampaikan terkait regulasi masih belum jelas dan bersumber acak. Akibatnya, beberapa dari seluruh responden memilih untuk memfokuskan pasar selain Eropa dahulu untuk menghindari ambiguitas dalam menghadapi permintaan.

- **Optimalisasi Bantuan EUDR**

Bagi petani dan koperasi, bantuan yang diberikan pemerintah berdampak sangat besar terhadap operasional ekspor mendatang. Hal ini dikarenakan terbatasnya aksesibilitas *smallholders* terhadap hal yang berhubungan dengan persyaratan regulasi, baik dari segi biaya, wawasan, maupun fasilitas. Keterbatasan ini yang seharusnya menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk merentangkan jangkauannya, sehingga koperasi tetap dapat melanjutkan aktivitas ekspor tanpa resah. Namun, hal ini juga perlu diiringi dengan pemberdayaan yang optimal dari segala segi agar yang diterima koperasi adalah dampak positif berkelanjutan.

Jika melihat respon yang diberikan oleh kelima responden, hampir seluruhnya berkeluh kesah terkait upaya pemerintah yang belum totalitas. Keoptimalan ini dapat dilihat dari segi respon *stakeholder* yang cenderung lambat, bantuan awal yang masih kurang terfasilitasi dengan baik, hingga ketidakjelasan informasi yang kerap membuat eksportir rancu sebagai penerima informasi. Tentu hal ini menjadi keresahan karena kebanyakan eksportir khawatir ketidakefektifan yang selama ini dirasakan akan berjangka panjang dan berpengaruh pada permintaan yang sewaktu-waktu muncul. Apabila hingga permintaan tersebut datang, otomatis para eksportir hanya bisa berpasrah karena ketidaksiapan, serta minimnya bantuan yang diberikan.

Meskipun pemerintah dalam negeri dikatakan belum memenuhi perannya terkait sosialisasi regulasi, namun di lain sisi, perhatian juga perlu diberikan kepada pemerintah wilayah terkait, yaitu Eropa. Melihat respon dari eksportir yang memperkuat bahwa seringkali dalam kasus lain terdapat arahan dan pendampingan dari perwakilan pemangku kebijakan di negara lain. Tentu dampak atas pendampingan tersebut eksportir merasa lebih dihargai atas usahanya untuk melakukan ekspor ke negara tujuan. Hal ini menunjukkan bahwa sisi seberang pun belum secara maksimal memberikan penyuluhan, terutama pada kelompok *smallholders*.

- **Peningkatan Kapasitas Digitalisasi**

Dari segi teknologi, Indonesia memang bukan dikatakan sebagai negara dengan fasilitas termutakhir di dunia, khususnya dalam penerapannya pada operasional UMKM (Tambunan & Busnetti, 2024). Namun, bukan tidak mungkin hal ini dapat dipelajari melalui *workshop* maupun pelatihan lainnya. Sebab dalam operasionalnya, khususnya dalam menghadapi regulasi internasional, akan terdapat banyak batasan yang mengharuskan pemberdayaan teknologi digital. Sedangkan,

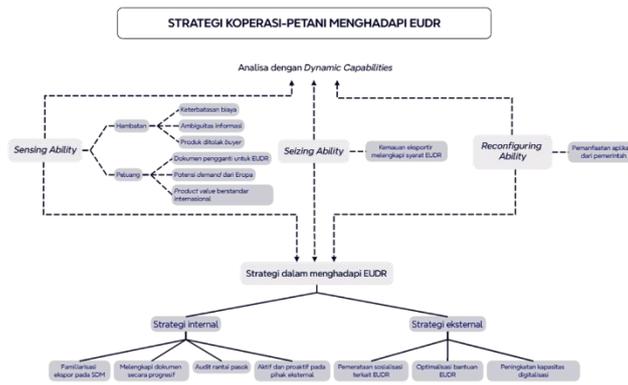
melihat fakta lapangan, masih ditemukan sekian banyak kasus SDM maupun *output* yang belum menunjukkan kualitas yang setidaknya cukup baik dari segi teknologi digital.

Dalam respon yang diberikan oleh 2 dari 5 koperasi, diketahui bahwa bantuan pemerintah terkait teknologi digital sudah diberikan. Bantuan tersebut berupa aplikasi dan *software* yang dapat digunakan pihak koperasi untuk melacak titik geolokasi, serta *traceability*. Namun, terkait kualitas performa digitalisasi yang diberikan masih sangat terbatas, dimana titik koordinat yang ditampilkan masih kurang sesuai dengan data lapangan. Padahal, fasilitas penunjang ini dapat menjadi faktor pendukung utama para koperasi agar dapat memenuhi persyaratan dengan lebih mudah. Setidaknya, jika informasi regulasi masih belum tersebar secara merata, bantuan secara digital dapat dimaksimalkan agar tidak seluruh aspek pendukung terkesan tidak berkontribusi apapun dalam mempersiapkan eksportir untuk menghadapi regulasi internasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi *European Union Deforestation Regulation* (EUDR) telah menjadi tantangan besar bagi koperasi petani-eksportir kopi di Indonesia, terutama dalam hal pemenuhan dokumentasi yang kompleks dan membutuhkan kesiapan kelembagaan. Hasil penelitian mengungkap bahwa rata-rata kesiapan dokumentasi dari lima koperasi yang menjadi objek studi masih berada di bawah 50%, tepatnya sekitar 40%, yang menunjukkan rendahnya kesiapan koperasi dalam memenuhi standar pelacakan dan dokumentasi EUDR. Hambatan utama yang dihadapi koperasi meliputi ambiguitas informasi terkait kebijakan, keterbatasan biaya implementasi, serta kekhawatiran terhadap potensi penolakan produk oleh pihak pembeli akibat ketidaklengkapan dokumen. Untuk menjawab tantangan tersebut, koperasi telah berupaya menerapkan strategi mandiri, antara lain dengan menindaklanjuti bantuan eksternal, mengoptimalkan produktivitas internal, serta membangun komunikasi aktif dengan pemangku kebijakan. Namun, strategi tersebut belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kesiapan dokumentasi. Sehingga penulis menyusun strategi adaptif berdasarkan acuan teori *dynamic capabilities* meninjau dari hambatan, peluang, serta upaya yang telah dilakukan koperasi dalam diagram berikut,



Gambar 5. Diagram Strategi Koperasi Menghadapi EUDR

Saran

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa rekomendasi dapat disampaikan. Pertama, koperasi diharapkan mulai mengimplementasikan strategi praktis secara lebih terarah dan terukur guna meningkatkan kesiapan menghadapi pemberlakuan penuh EUDR, sehingga risiko kerugian akibat ketidaksiapan dapat diminimalkan. Kedua, pemerintah daerah perlu lebih responsif terhadap keluhan dan kesulitan yang dialami koperasi, terutama dengan memberikan pendampingan teknis dan dukungan kebijakan yang konkret untuk mendukung pemenuhan standar regulasi. Ketiga, pihak regulator EUDR diharapkan menyusun strategi penyuluhan dan komunikasi yang inklusif, yang menjangkau hingga kelompok pelaku usaha kecil dan koperasi, agar tidak terjadi ketimpangan informasi dan pelaksanaan. Keempat, untuk penelitian di masa mendatang, disarankan untuk memperluas cakupan objek dan lokasi penelitian agar diperoleh pemahaman yang lebih representatif. Selain itu, pengembangan metode campuran dan eksplorasi variabel lain seperti literasi kebijakan, jaringan kemitraan, atau efektivitas intervensi pemerintah dapat menjadi peluang pengembangan kajian yang lebih mendalam. Peneliti juga menyadari bahwa hasil penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah sampel dan ruang lingkup data, sehingga generalisasi temuan perlu dilakukan dengan hati-hati.

DAFTAR REFERENSI

- Agusta, I. (2003). Teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor, 27(10), 179-188.
- Alam, S. (2009). Ekonomi untuk SMA dan MA Kelas X Kurikulum 2013. Erlangga.
- Alesina, A., Angeloni, I., & Schuknecht, L. (2005). What does the European Union do? Public Choice, 123(3), 275-319.
- Aloui, O., & Kenny, L. (2005). The cost of compliance with SPS standards for Moroccan exports: A case study. World Bank Agriculture and Rural Development Discussion Paper.

- Ambrosini, V., Bowman, C., & Collier, N. (2009). Dynamic Capabilities: An Exploration of How Firms Renew their Resource Base. *British Journal of Management*, 20(s1).
- Anufia, B., & Alhamid, T. (2019). Instrumen pengumpulan data.
- Archer, C. (2008). *The European Union*. Routledge.
- Astia. (2019). Peramalan Volume Ekspor Kelapa Sawit Indonesia. *Jurnal Agribisnis Unisi*, 8(1), 38.
- Bagus P, B., Afifah, N., & Mustaruddin. (2024). Market orientation and export performance study of SMEs in Indonesia with dynamic capabilities, competitive advantage, and innovation capability as mediating variables: a Conceptual study. *International Journal of Economic, Finance and Business Statistics (IJEFBS)*, 2(3), 203-216.
- Basri, M. C., & Riefky, F. (2023). Ensuring inclusive, affordable, and smooth climate transition in Indonesia. Brookings Institution. <https://www.brookings.edu/articles/ensuring-inclusive-affordable-and-smooth-climate-transition-in-indonesia/>
- Basu, S., Roy, M., & Pal, P. (2019). Corporate greening in a large developing economy: pollution prevention strategies. *Environ Dev Sustain*, 21, 1603–1633.
- Bayrak, M. M., & Marafa, L. M. (2016). Ten years of REDD+: A critical review of the impact of REDD+ on forest-dependent communities. *Sustainability*, 8(7), 620.
- Berita/Kebutuhan Sawit di Eropa Masih Tinggi. (2018, October 7). BPDP. <https://www.bpdp.or.id/Kebutuhan-Sawit-di-Eropa-Masih-Tinggi>
- Blot, E., Oger, A., & Harrison, J. (2022). Enhancing sustainability in EU Free Trade Agreements: The case for a holistic approach.
- Bohnsack, R., Pfaff, N., & Weller, W. (2010). Qualitative analysis and documentary method: In international educational research. Verlag Barbara Budrich, 369.
- BPS. (2022). Statistik Kelapa Sawit Indonesia. Badan Pusat Statistik.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Braun, V., & Clarke, V. (2012). *Thematic analysis*. American Psychological Association.
- Bureau, J. C., & Swinnen, J. (2018). EU policies and global food security. *Global Food Security*, 16, 106-115.
- Čekanavičius, L., Bazytė, R., & Dičmonaitė, A. (2014). Green business: challenges and practices. *Ekonomika*, 93(1), 74-88.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.

- Dharmawan, A. H., Nasdian, F. T., Barus, B., Kinseng, R. A., Indaryanti, Y., Indriana, H., & Roslinawati, A. M. (2019). Kesiapan petani kelapa sawit swadaya dalam implementasi ISPO: Persoalan lingkungan hidup, legalitas dan keberlanjutan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 17(2), 304.
- Ditjen PPI - KLHK. (2024). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. <https://www.ditjenppi.org/indonesia/direktorat/mitigasi/ditjen-ppi-perkuat-program-redd-melalui-update-dokumen-summary-information>
- Domínguez-Cc, M., & Barroso-Castro, C. (2017). Managerial change and strategic change: The temporal sequence. *Journal of Management & Organization*, 23(1), 46-73.
- Dunne, D. (2019, March 27). The Carbon Brief Profile: Indonesia. Carbon Brief. <https://www.carbonbrief.org/the-carbon-brief-profile-indonesia/>
- Eisenhardt, K. M., & Martin, J. A. (2000). Dynamic Capabilities: What Are They? *Strategic Management Journal*, 21(10/11), 1105–1121.
- Epstein, M. J., & Buhovac, A. R. (2016, October 20). The comprehensive business case for sustainability. *Harvard Business Review*. <https://hbr.org/2016/10/the-comprehensive-business-case-for-sustainability>
- European Parliament. (2024, November 29). The EU's position in world trade in figures (infographic). <https://www.europarl.europa.eu/topics/en/article/20180703STO07132/the-eu-s-position-in-world-trade-in-figures-infographic>
- European Union. (2024). Achievements and benefits, European Union. https://european-union.europa.eu/achievements_en#:~:text=The%20EU%20is%20the%20largest,thanks%20to%20the%20single%20market.
- Ewaldo, E. (2015). Analisis ekspor minyak kelapa sawit di Indonesia. *E-Journal Perdagangan Industri dan Moneter*, 3(1), 10-15.
- Faiz Masnan, N. M., & Saad, A. A. (2018). Assessing the implications of dynamic capability and international opportunity recognition on export performance of manufacturing SMEs in Malaysia. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(8).
- Fauzi, Y., Widyastuti, Y. E., Satyawibawa, I., & Paeru, R. H. (2012). Kelapa sawit. Penebar Swadaya Grup.
- Fetting, C. (2020). The European green deal. *ESDN Report*, 2(9).
- Fineman, S. (2000). *The business of greening*. Routledge.
- Fitriati, T. K., Purwana, D., & Buchdadi, A. D. (2020). Dynamic Capabilities and SMES Performance: The Mediating Effect of Innovation (Study of SMES in Indonesia). In *Proceedings of the 1st International Conference on Science, Health, Economics, Education and Technology (ICoSHEET 2019)*.

- Gaveau, D. L., Sheil, D., Husnayaen, S. M., Arjasakusuma, S., Ancrenaz, M., & Meijaard, E. (2016). Rapid conversions and avoided deforestation: examining four decades of industrial plantation expansion in Borneo. *Scientific Reports*, 6(1), 32017.
- Gilbert, C. (2024). *The EU Deforestation Regulation*. EuroChoices.
- Harvey, M. G., & Lusch, R. F. (1995). Expanding the nature and scope of due diligence. *Journal of Business Venturing*, 10(1), 5-21.
- Hasan, F., Ahmad, T., Hidayat, A. N., Zubaidah, D. D., & Al Ghifari Azizi, M. H. (2023). *Mengurai Kesesuaian ISPO dan EUDR (INDEF Policy Brief No. 08/2023)*. The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).
- Hasan, I. (2014). Analisis kinerja koperasi pertanian dalam tataniaga komoditas ekspor di Kabupaten Aceh Tengah-Provinsi Aceh dalam menghadapi persaingan antar negara asean 2015. *Jurnal Kebangsaan*, 3(6), 103280.
- Hasan, M. M., Nekomahmud, M., Yajuan, L., & Patwary, M. A. (2019). Green business value chain: A systematic review. *Sustainable Production and Consumption*, 20, 326-339.
- Hasan, Z. I., Akbar, A., & Bustaman, A. (2024). Kesiapan Produk Furnitur Indonesia dalam Memenuhi Regulasi Anti Deforestasi Uni Eropa dan Pengoptimalan Pasar Negara Mitra FTA (Studi Kasus PT. Masagena Maruarar Salawasna, Cirebon). *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 4(6), 1671-1682.
- Hawk, R. (1990, October). The greening of Europe. *Europe*, 6–8.
- Henson, S., & Mitullah, W. (2004). Kenyan exports of Nile Perch: impact of food safety standards on an export-oriented supply chain.
- Hidayat, N. K., Offermans, A., & Glasbergen, P. (2018). Sustainable palm oil as a public responsibility? On the governance capacity of Indonesian Standard for Sustainable Palm Oil (ISPO). *Agriculture and Human Values*, 35, 223-242.
- Indonesian, R. E., & Force, T. (2012). *REDD+ national strategy*. Indonesia REDD+ Task Force.
- Jansson, J., Marell, A., & Nordlund, A. (2010). Green consumer behavior: determinants of curtailment and eco-innovation adoption. *Journal of Consumer Marketing*, 27(4), 358-370.
- Jin, B., & Cho, H. J. (2018). Examining the role of international entrepreneurial orientation, domestic market competition, and technological and marketing capabilities on SME's export performance. *Journal of Business & Industrial Marketing*, 33(5), 585-598.
- Joffe, H. (2011). Thematic analysis. In *Qualitative research methods in mental health and psychotherapy: A guide for students and practitioners* (pp. 209-223).
- Karagülle, A. Ö. (2012). Green business for sustainable development and competitiveness: an overview of Turkish logistics industry. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 41, 456-460.

- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2025, January 30). Pemerintah dorong UMKM naik kelas tingkatkan kontribusi terhadap ekspor Indonesia. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6152/pemerintah-dorong-umkm-naik-kelas-tingkatkan-kontribusi-terhadap-ekspor-indonesia>
- Khourouh, U., Windhyastiti, I., & Ratnaningsih, C. S. (2021). Kapabilitas Dinamik dan Keunggulan Bersaing: Dinamisme Lingkungan Moderator ataukah Driver? *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 18-34.
- Kontan.co.id. (2023, July 17). Business Insight. <https://insight.kontan.co.id/news/membenahi-koperasi>
- Koplitz, S. N., Mickley, L. J., Marlier, M. E., Buonocore, J. J., Kim, P. S., Liu, T., & Myers, S. S. (2016). Public health impacts of the severe haze in Equatorial Asia in September–October 2015: demonstration of a new framework for informing fire management strategies to reduce downwind smoke exposure. *Environmental Research Letters*, 11(9), 094023.
- Kospa, H. S. (2016). Konsep perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. *Jurnal Tekno Global*, 5(1).
- Laroche, M., Bergeron, J., & Barbaro-Forleo, G. (2001). Targeting consumers who are willing to pay more for environmentally friendly products. *Journal of Consumer Marketing*, 18(6), 503-520.
- Liamputtong, P. (2009). Qualitative data analysis: conceptual and practical considerations. *Health Promotion Journal of Australia*, 20(2), 133-139.
- Liliani, L., & Wiliana, J. (2018). Kapabilitas dinamis UMKM dalam merespons perubahan lingkungan bisnis. *Business and Finance Journal*, 3(1).
- Lochmiller, C. R. (2021). Conducting thematic analysis with qualitative data. *The Qualitative Report*, 26(6), 2029-2044.
- Makower, J., & Pike, C. (2009). Strategies for the green economy: Opportunities and challenges in the new world of business.
- Malterud, K. (2001). Qualitative research: Standards, challenges, and guidelines. *The Lancet*, 358(9280), 483–488.
- Mariana, K. (2023). PERANAN ETIKA BISNIS DALAM MENGHADAPI GLOBAL WARMING DI ERA GLOBALISASI. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 30-35.
- Melati, K., Lee, H., & Jintarith, P. (2024). Finding a place for smallholder farmers in EU deforestation regulation.
- Miocevic, D., & Crnjak-Karanovic, B. (2011). Cognitive and information-based capabilities in the internationalization of small and medium-sized enterprises: The case of Croatian exporters. *Journal of Small Business Management*, 49(4), 537-550.

- Mizulin, N., Vander S, P., Geraets, D., & Antoshevskaya, I. (2024, March 25). Deforestation Regulation: Impact of a Possible Delay in Risk Classification of Countries and other Developments.
- Mongabay. (2023, January 4). For Indonesian smallholders, EU deforestation rule is a threat — and an opportunity.
- Nakita, C., & Najicha, F. U. (2022). Pengaruh deforestasi dan upaya menjaga kelestarian hutan di Indonesia. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 6(1), 92-103.
- Nasution, S., Hidayati, S., Nasution, P. R., & Hasyim, H. (2024). Peranan koperasi dalam perekonomian Indonesia. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(2), 522-530.
- Parliament, E. (2023). Regulation (EU) 2023/1115 of the European Parliament and of the Council of 31 May 2023 on the making available on the Union market and the export from the Union of certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation and r. *Off. J. Eur. Union*, 150, 206-247.
- Parluhutan, M. C. (2024). The EU Environmental Policy's "Branching Beyond Borders": Exploring the Externalization of the EU Deforestation Regulation in Indonesia [Master's thesis, NTNU].
- PASPI, T. R. (2018). KONTRIBUSI INDUSTRI CPO DALAM SURPLUS NERACA PERDAGANGAN INDONESIA - UNI EROPA. *Monitor Isu Strategis Sawit Vol. IV*, No. 07/02/2018.
- Permatasari, A. P., Fauziyah, D., Naufal, F., Afian, S., Nisa, S. C., Fetra, T., & Hadad, N. (2023). Strengthening Indonesia's readiness to navigate the European Union Deforestation-Free regulation through improved governance and inclusive partnership.
- Pramana, A. (2019). PENERAPAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN UNI EROPA DALAM EKSPOR MINYAK SAWIT INDONESIA TAHUN 2009-2018 [Doctoral Dissertation].
- Prasetyo, B. E., & Trisnaningtyas, J. P. (2025). REDD+ Sebagai kerangka Pembangunan Berkelanjutan Indonesia: Program dan dampak Implementasi di Tingkat Nasional (2010–2021). *MAKILA*, 19(1), 121-136.
- Prihastuty, D. R. (2023). BAB VIII SAMPLING. PENGANTAR, 97.
- Puspa, H., & Rakhma, S. (2024). Ekspor Tertinggi Ke Uni Eropa!.. Naik 14,63 Persen Pada Januari 2024. *Kompas.com*.
- Puteri, L. T., & H. M, R. (2014). Analisis Strategi Bersaing PT. Masterindo Jayaglobal Indonesia. *Agora*, 2(1), 480-489.
- Putranto, A. H., Panunggul, V. B., Kinding, D. P., & Noviani, F. (2022). Analisis Kontribusi Ekspor Kopi Terhadap PDB Sektor Perkebunan di Indonesia. *Perwira Journal of Economics & Business*, 2(2), 32-41.

- Putri, M. K., & Azizah, N. S. (2023). Pengaruh Orientasi Kewirausahaan Terhadap Kinerja Internasionalisasi Dengan Moderasi Kemitraan Pada UMKM Kategori Siap Ekspor Binaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. *SEIKO: Journal of Management*.
- Rinaldy, E., Ikhlas, D., & Utama, A. (2021). *Perdagangan Internasional: Konsep dan Aplikasi*. Bumi Aksara.
- Ritchie, H. (2021). *Deforestation and Forest Loss*. Our World in Data.
- Rizkiana, R. (2022). *Deforestasi: Pengertian, Penyebab, Dampak dan Pencegahan*. SAGE Publications Ltd. (n.d.). *Strategy for Business*.
- Sahuri, S., Syarif, L. F., Akbar, A., Tistama, R., Rahutomo, S., & Alamsyah, A. (2024). STRATEGI MENGHADAPI REGULASI BEBAS DEFORESTASI UNI EROPA (EUDR) PADA KARET ALAM BERKELANJUTAN. *Warta Perkaretan*, 43(1), 57-66.
- Saleh, S. (2017). *Analisis data kualitatif*.
- Sari, L. P., Lesmana, I. S., & Desiyani, R. E. (2022). ANALISIS INFLASI DAN KURS TAHUNAN DALAM MELIHAT KONDISI RIIL EKSPOR KOPI INDONESIA DI 5 (LIMA) NEGARA UNI EROPA. In *National Conference on Applied Business, Education, & Technology (NCABET)* (Vol. 2, No. 1, pp. 149-160).
- Sarosa, S. (2021). *Analisis data penelitian kualitatif*. Pt Kanisius.
- Schumacher, E. (1973). *Small is Beautiful*. Abacus.
- Shidiq, M., Htet, H., Abdullah, A., Rakhiemah, A. N., Pradnyaswari, I., Margenta, I. D., & Suryadi, B. (2024). Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Implementation on Reducing Emission in the ASEAN Energy Sector. In *IOP Conference Series*.
- Shiferaw, R. M., & Kero, C. A. (2024). Dynamic capabilities view practices of business firms: a systematic literature review. *Cogent Business & Management*, 11(1).
- Sidabutar, V. (2014). *Peluang dan Permasalahan yang Dihadapi UMKM Berorientasi Ekspor*. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia, Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional.
- Sipayung, T. (2023). DAMPAK EKONOMI EUROPEAN UNION DEFORESTATION FREE REGULATION (EUDR) PADA INDUSTRI SAWIT NASIONAL.
- Siswanto, A. D. (2010). ANALISIS POTENSI PENDAPATAN DARI MEKANISME REDD SEKTOR KEHUTANAN DI INDONESIA. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 14(1), 101-122.
- Sitasari, N. W. (2022). Mengenal analisa konten dan analisa tematik dalam penelitian kualitatif. In *Forum Ilmiah* (Vol. 19, No. 1, pp. 77-84).

- Situmorang, J. R. (2018). Mengenal lebih dalam apa itu kapabilitas dinamik. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 14(1), 20-27.
- Sjafudin, H. (1995). *Strategi dan Agenda Pengembangan Usaha Kecil*. Yayasan Akgita.
- Slater, D. (2003). Cultures of consumption. In *Handbook of cultural geography* (pp. 147-163).
- Somantri, G. R. (2005). Memahami metode kualitatif. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 9(2), 57-65.
- Sulaiman, A. (2018). *Perdagangan Internasional Komoditas Pangan Strategis: Mengangkat Kesejahteraan Petani Pangan di Era Globalisasi Perdagangan*.
- Suwarno, W. (2019). Kebijakan Sawit Uni Eropa dan Tantangan bagi Diplomasi Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 24.
- Syafia, V. F., & Indriastuti, M. (2021). Peran E-Readiness Dan Dynamic Capability Pada Peningkatan Kinerja UKM. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Ekonomi*, 1(1).
- Tambunan, T. T., & Busnetti, I. (2024). Recent Evidence on the Digitalization Process in Indonesia's Micro and Small Enterprises. *International Journal of Current Science Research and Review*, 7(08).
- Taylor, S. J., & Bogdan, R. C. (1984). *Introduction to qualitative research methods: The search for meanings*.
- Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. *Strategic Management Journal*, 18(7), 509-533.
- Terry, G., Hayfield, N., Clarke, V., & Braun, V. (2017). Thematic analysis. In *The SAGE handbook of qualitative research in psychology* (Vol. 2, pp. 17-37).
- The European Parliament and The Council of The European Union. (2010). REGULATION (EU) No 995/2010 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:295:0023:0033:EN:PDF>
- The European Parliament and The Council of The European Union. (2023). REGULATION (EU) 2023/1115 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R>
- THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. (2023). REGULATION (EU) 2023/956 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a carbon border adjustment mechanism.
- Titievskaja, J. (2021). Sustainability provisions in EU free trade agreements: Review of the European Commission action plan.
- Union, C. o. (n.d.). *Uni Eropa: Sejarah, Struktur, dan Fungsi*. In Council of the European Union.

- Union, E. (2023). Regulation (EU) 2023/956 of the European Parliament and of the council of 10 May 2023 establishing a carbon border adjustment mechanism. *Official Journal of the European Union*, 66, 130-152.
- van der Meulen, B. M. (2009). The system of food law in the European Union. *Deakin Law Review*, 14(2), 305-339.
- Varzakas, T., & Smaoui, S. (2024). Global Food Security and Sustainability Issues: The Road to 2030 from Nutrition and Sustainable Healthy Diets to Food Systems Change. *Foods*, 13(2), 306.
- Vijayasri, G. V. (2013). The importance of international trade in the world. *International Journal of Marketing, Financial Services & Management Research*, 2(9), 111-119.
- Viswanathan, L., & Varghese, G. (2018). Greening of business: A step towards sustainability. *Journal of Public Affairs*, 18(2), e1705.
- Wahyuni, H., & Suranto. (2021). Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 149.
- Wendra, M., & Sutrisno, A. (2023). Penerapan Hukum Internasional Terkait United Nation Framework Convention on Climate Change dalam Menghadapi Perubahan Iklim. *Journal Evidence Of Law*, 2(2), 265-275.
- Widyaningtyas, D., & Widodo, T. (2017). Analisis pangsa pasar dan daya saing CPO Indonesia di Uni Eropa. *Jurnal Manajemen DayaSaing*, 18(2), 138-145.
- Wijaya, H. (2020). Analisis data kualitatif teori konsep dalam penelitian pendidikan. *Sekolah Tinggi Theologia Jaffray*.
- Wulandari, M. A. (2024). Strategi Adaptasi dalam Menghadapi Perubahan Ekonomi Terbaru. *Jurnal Ekonomi STIEP*, 9(1), 85–92.
- Yuniarti, S. (2013). Peran Perbankan dalam Implementasi Bisnis Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 17(3), 463-472.
- Zaki, M. R. (2021). *Hukum Perdagangan Internasional*. Prenada Media.